

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/ Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBAWA
Tahun Anggaran : 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	Persen	100
2.	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.	Persen	100
3.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	Persen	100
4.	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Lembaga	5
5.	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persen	100
6.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui media yang tersedia.	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	Persen	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
7.	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	Persen	100
8.	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	Persen	100
9.	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Persen	100
10.	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	Laporan	2
11.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	Persen	100
12.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	Persen	100
13.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	Persen	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
14.	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	Lembaga	5
15.	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman KPU.	Persen	80
16.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase pelayanan publik secara baik.	Persen	100
17.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Laporan	4
18.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	Persen	100
19.	Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase jumlah Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang pelaksanaan PAW-nya sesuai ketentuan yang berlaku.	Persen	100
20.	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan	Persen	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		update.		
21.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai.	Persen	100
22.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	Persen	100
23.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota.	Persen	100
24.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota.	Persen	95
25.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota.	Persen	100
26.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti.	Persen	100
27.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti.	Persen	100
28.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan	Persen	100 (WTP)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kabupaten/Kota.	material.		
29.	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota.	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota.	Nilai	100
30.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan.	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP.	Persen	100
31.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan.	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK).	Laporan	2
32.	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase KPU penyediaan data dan informasi secara valid.	Persen	100
33.	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku.	Persen	100
34.	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai.	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai.	Persen	100
35.	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia.	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada.	Persen	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
36.	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Persen	100
37.	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait.	Persentase pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait.	Persen	100

Sumbawa Besar, 13 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa,



Agus Salim